



**ANALISA KINERJA PENYALURAN KREDIT TERHADAP RISIKO KREDIT
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT TAHUN 2016 - 2019**

Wangsit Supeno, Ketut Martana
Fakultas Teknik Informasi Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI)
(Naskah diterima: 1 Maret 2020, disetujui: 25 April 2020)

Abstract

Based on Indonesian banking statistics in 2019, the rural bank (BPR) has a positive performance in the growth of credit distribution. This credit growth shows that rural bank (BPR) function in carrying out credit-giving activities is still gaining trust from the community, so it still has its existence and opportunities to increase Credit distribution amid increasingly sharp competition. The distribution of working capital loans in 2019, has a positive impact on the growth of the most dominant economic sector, namely trade, agriculture and services in every province where the rural bank (BPR) operates. While investment credit distribution also helps many people in the sector of trade and community services. The consumptive credit distribution helps the community who needs funds for other urgent consumption sectors. In connection with the growth of the credit of the creditor of the rural bank (BPR) in 2019, the management of the rural bank (BPR) should pay attention to the level of credit risk arising by measuring the ratio of Non-Performing Loan (NPL), so that the rural bank (BPR) can take effective and efficient anticipation measures so that the credit delivered can improve the healthy and profitable assets.

Keywords: *Performance, Credit Distribution, Credit Risk*

Abstrak

Berdasarkan Data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2019, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kinerja yang positif dalam pertumbuhan penyaluran kredit. Pertumbuhan kredit ini menunjukkan bahwa fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara Nasional dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit masih mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga masih memiliki eksistensi dan peluang dalam meningkatkan penyaluran kredit di tengah persaingan yang semakin tajam. Penyaluran kredit modal kerja pada tahun 2019, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor perekonomian yang paling dominan yaitu perdagangan, pertanian dan jasa di setiap provinsi di mana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) beroperasi. Sedangkan penyaluran kredit investasi juga banyak membantu masyarakat di sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Penyaluran kredit konsumtif banyak membantu masyarakat yang memerlukan dana untuk sektor konsumsi lainnya yang bersifat mendesak. Berkaitan dengan pertumbuhan penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tahun 2019, maka manajemen Bank Perkreditan Rakyat (BPR) harus memperhatikan tingkat risiko

kredit yang timbul dengan mengukur rasio Non Performing Loan (NPL), sehingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat melakukan tindakan antisipasi yang efektif dan efisien agar kredit yang disalurkan dapat meningkatkan asset yang sehat dan menguntungkan.

Katakunci: Kinerja, Penyaluran Kredit, Kredit Bermasalah

I. PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, selain menghimpun dana memiliki kegiatan utama memberikan kredit kepada masyarakat. Kredit merupakan aktiva produktif utama yang dimiliki BPR dan memiliki kontribusi besar terhadap kesinambungan usaha BPR, sehingga idealnya setiap BPR memiliki kinerja yang baik dalam penyaluran kredit, baik untuk keperluan Modal Kerja, Investasi maupun Konsumtif berdasarkan Sektor Ekonomi masing-masing yang menjadi sasaran target penyaluran kredit BPR. Pentingnya pengukuran kinerja suatu BPR, yaitu untuk memberikan gambaran baik buruknya operasional BPR kepada Pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen BPR sebagai pengambil keputusan.

Menurut penelitian (Romli & Alie, 2017), sejumlah penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penyaluran kredit mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dana berlebih (*surplus fund*) yang disalur-

kan secara efisien bagi unit yang mengalami defisit akan meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya kegiatan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Strategi ekspansi kredit yang berorientasi pada sektor-sektor produktif yang disertai dengan peningkatan efisiensi, berdampak positif terhadap kinerja profitabilitas perbankan. Berdasarkan data yang disajikan dalam laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI), pada tahun 2019 menunjukkan jumlah penyaluran kredit BPR cenderung meningkat di sektor non produktif. Menurut penelitian (Nurjannah & Nurhayati, 2017), pemerintah jika ingin meningkatkan kredit investasi, kredit modal kerja, maka diperlukan kebijakan-kebijakan pendukung, dengan meningkatkan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi sehingga dampak terhadap perekonomian dapat tercapai. Kredit konsumsi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka perlu diarahkan agar dalam jangka panjang kredit ini bukan mendidik masyarakat untuk semakin konsumtif, namun untuk pengembangan *home industry* untuk usaha-usaha konsumsi, agar

mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi secara riil.

BPR sebagai salah satu lembaga keuangan, dalam menyalurkan dana yang telah dihimpun dalam bentuk pemberian kredit tentunya tidak akan lepas dari risiko terkenalnya pengembalian kredit. Hal ini dapat dilihat dari parameter rasio Non Performing Loan (NPL). Jika rasio NPL melampaui angka 5% berarti kondisi penyaluran kredit BPR secara kualitas kurang baik, sebab batas rasio yang dinilai sehat adalah 5%.

Menurut penelitian (Novianto, Suharti, & Yudhawati, 2015) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan kredit terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada PD.BPR LPK Leuwiliang Kabupaten Bogor, walaupun hasil penelitian pengaruhnya lemah akan tetapi dalam rangka untuk menurunkan rasio *Non Performing Loan*, maka BPR perlu meningkatkan realisasi kredit baik kredit untuk keperluan modal kerja, investasi atau-pun konsumtif. Selain itu diperlukan upaya penyelamatan kredit macet dengan cara penagihan dan dengan menggunakan cara penyelamatan kredit melalui penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*Restructuring*).

Kinerja pemberian kredit BPR setiap triwulan tercermin dalam laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI). Berdasarkan laporan tersebut tersaji data-data yang terkait kinerja pemberian kredit, di antaranya data perkembangan pemberian kredit BPR berdasarkan sektor ekonomi, jenis penggunaan kredit, *outstanding* penyaluran kredit dan kredit yang bermasalah atau *Non Performing Loan*.

II. KAJIAN TEORI

2.1. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut (Supeno, 2017), Lembaga Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha BPR konvensional sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Menurut Triandanu dalam (Supeno &

Islami, 2019), kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun.

2.2. Kinerja Penyaluran Kredit

Menurut Soedarto dalam (Supeno, 2017) usaha pokok bank adalah memberikan kredit tercermin dari hampir 70% - 80% assets bank berbentuk kredit yang diberikan. Demikian pula pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan perkreditan berupa pendapatan bunga dan provisi kredit.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam (Supeno, 2017), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut (Kasmir, 2015), secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

1. Di lihat dari Segi Kegunaan, adalah untuk melihat penggunaan uang apakah kredit digu-

nakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan.

Menurut Abdullah dalam (Alinda & Kusuma, 2018) kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank.

2.3. Risiko Penyaluran Kredit

Menurut Ali dalam (Supeno, 2015), pengertian Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat dari gagalnya penerima kredit (debitur) dalam memenuhi perjanjian kredit untuk melunasi pembayaran angsuran pokok dan pembayaran bunga kredit pada bank. Menurut Riyadi dalam (Supeno, 2015), Setiap kegiatan penempatan dana yang dilakukan bank, maka di dalamnya melekat risiko yang harus ditanggung. Pengertian Risiko Kredit adalah risiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipin-

jam dan bunga yang harus dibayarnya.

Menurut Soedarto dalam (Supeno, 2017), bank yang menghadapi risiko kredit yang besar ditandai dengan besarnya kredit *Non Performing* akan menghadapi memburuknya *cash inflow* yang dampaknya dapat menimbulkan risiko likuiditas dan risiko lainnya. Penyebab timbulnya risiko kredit dapat terjadi karena faktor intern dan faktor ekstern.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Kinerja Penyaluran Kredit BPR

Penyaluran kredit merupakan aktivitas utama dari industri jasa keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di tengah perlambatan ekonomi global dan persaingan yang begitu ketat, terlebih dengan semakin banyaknya penawaran melalui *Financial Technology* (*Fintech*) atau penawaran dari bank umum melalui kredit program yang menarik, kinerja penyaluran kredit BPR masih menunjukkan adanya pertumbuhan selama empat tahun terakhir.

Pertumbuhan penyaluran kredit ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami peran BPR dalam membantu pengembangan perkonomi masyarakat. BPR yang mampu memberikan pelayanan terbaik dan memiliki kinerja keuangan yang baik akan mampu terus eksis di tengah persaingan yang semakin

tajam. Jumlah BPR sampai dengan Desember 2019 sebanyak 1545, sedangkan jumlah kantor pelayanan BPR yang memudahkan masyarakat mendapatkan fasilitas layanan BPR jumlahnya mencapai 5.939 kantor. Jumlah BPR pada akhir tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang jumlahnya sebanyak 1.597 kantor. Sedangkan untuk jumlah kantor juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang jumlahnya sebanyak 6.273 kantor. Meskipun jumlah BPR dan kantor BPR mengalami penurunan, tetapi kinerja penyaluran kredit industri BPR secara Nasional dari tahun ke tahun, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 tetap mengalami pertumbuhan yang positif.

Berikut ini data pertumbuhan kinerja penyaluran kredit BPR sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan pada Data yang diperoleh dari Statistik Perbankan Indonesia tahun 2019 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 1. Kinerja Penyaluran Kredit BPR Tahun 2016 – 2019

Keterangan	Penyaluran Kredit BPR per Tahun (Dalam Miliar Rupiah)							
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Jumlah Kredit dan Prosentasi Pertumbuhan	81.684	9,2%	89.482	9,5%	98.220	9,8%	108.784	10,8%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kinerja penyaluran kredit BPR secara keseluruhan sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, walaupun tidak signifikan prosentasi kenaikan pertumbuhannya, namun dinilai masih positif terhadap kinerja BPR.

Pada tahun 2016 penyaluran kredit BPR tumbuh sekitar 9,2% dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah kredit yang disalurkan BPR sebesar Rp. 74.807 triliun, sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp. 81.684 triliun. Pada tahun 2017 penyaluran kredit BPR tumbuh 9,5% dari tahun 2016, di mana pada tahun 2016 penyaluran kredit sebesar Rp. 81.684 triliun, sedangkan pada tahun 2017 penyaluran kredit naik menjadi Rp. 89.482 triliun. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah penyaluran kredit BPR mengalami pertumbuhan sebesar 9,8% dari tahun 2017, di mana pada tahun 2017 penyaluran kredit sebesar Rp. 89.482 triliun, sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp. 98.220 triliun. Dan pada tahun

2019 penyaluran kredit BPR secara Nasional mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 10,8%, di mana penyaluran kredit pada tahun 2019 sebesar Rp. 108.784 triliun sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 98.220 triliun.

Pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun 2019 sebesar 10,8% menunjukkan bahwa fungsi BPR secara Nasional dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit masih mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga masyarakat masih setia menjadi mitra usaha BPR. Selain itu, dengan adanya pertumbuhan penyaluran kredit pada tahun 2019 yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan BPR masih memiliki eksistensi dan peluang dalam meningkatkan penyaluran kredit di tengah persaingan yang semakin tajam dengan penguatan pelayanan berbasis teknologi digital, dan penawaran kemudahan yang diberikan para pesaing.

Keberhasilan BPR dalam membangun kepercayaan dan mempublikasi layanan jasa BPR melalui program literasi keuangan, sangat membantu dalam memperkenalkan peran

dan aktivitas BPR sebagai mitra pembangunan ekonomi masyarakat di sekitar BPR beroperasi.

Kemudahan dalam pelayanan dan proses yang cepat, serta angsuran kredit yang terjangkau dengan lokasi kantor BPR yang dekat dengan aktivitas masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan penyebaran operasional BPR di seluruh provinsi, menjadikan BPR sebagai andalan mitra kerjasama yang saling menguntungkan. Selain itu, BPR memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni baik jumlah dan keterampilan yang dimiliki dalam memberikan pelayanan terbaik, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor BPR melainkan dengan menerapkan prinsip “jemput Bola”. Hal ini yang menjadikan BPR memiliki kedekatan dengan masyarakat. Segmentasi pasar BPR adalah masyarakat yang memiliki aktivitas sebagai pegawai baik negeri maupun swasta, para pemilik usaha baik mikro, kecil maupun menengah, para petani, nelayan dan lain-lain.

Proses pemberian kredit BPR mengacu

pada prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan kualitas, bukan hanya kuantitas penyaluran kredit yang akan berdampak pada risiko yang dapat merugikan operasional BPR di kemudian hari. Kualitas pemberian kredit yang sehat menjadi prioritas bagi BPR. Dengan memperhatikan manajemen risiko sejak awal pengajuan sampai dengan proses analisa kredit. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan aset dan pendapatan BPR yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan operasional BPR dalam memperoleh laba yang diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga kesinambungan usaha BPR terus berjalan dan fungsi intermediasi BPR diharapkan terlaksana sesuai regulasi yang berlaku.

Distribusi kinerja penyaluran kredit BPR pada tahun 2019 yang terbesar terdapat di lima Provinsi sebagai berikut:

Tabel 2. Kinerja Penyaluran Kredit BPR Di Lima Provinsi Tahun 2016 - 2019

Provinsi	Penyaluran Kredit BPR per Tahun (Dalam Miliar Rupiah)							
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Jawa Tengah	18.605	11,7%	21.014	12,9%	23.620	12,4%	26.912	13,9%
Jawa Barat	10.794	-2,0%	11.637	7,8%	12.554	7,9%	13.848	10,3%
Bali	9.032	9,1%	9.633	6,7%	10.431	8,3%	11.287	8,2%

Jawa Timur	8.788	6,8%	9.271	5,5%	9.836	6,1%	10.797	9,8%
Lampung	7.787	9,0%	8.590	10,3%	9.111	6,1%	9.664	6,1%
Jumlah	55.006	7,2%	60.145	9,3%	65.552	9,0%	72.508	10,6%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penyaluran kredit BPR terbesar selama empat tahun terakhir, terkonsentrasi di lima provinsi yaitu provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur dan Lampung.

Dari seluruh provinsi, BPR di provinsi Jawa Tengah terbesar dalam penyaluran kredit. Menurut data Statistik Perbankan Indonesia pada akhir Desember 2019, jumlah BPR di provinsi Jawa Tengah sebanyak 252 BPR dengan jumlah kantor pelayanan berupa Kantor Cabang sebanyak 547 kantor, dan Kantor Pelayanan Kas sebanyak 759 kantor. Kinerja penyaluran kredit BPR di Jawa Tengah pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 13,9% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 12,4%. Pertumbuhan penyaluran kredit di provinsi Jawa Tengah ini memberikan kontribusi sebesar 24,7% terhadap total penyaluran kredit BPR secara nasional pada tahun 2019.

Setelah itu BPR di provinsi Jawa Barat juga telah menyalurkan kredit cukup besar pada tahun 2019. Pada akhir Desember 2019, di provinsi Jawa Barat terdapat 244 BPR,

dengan jumlah Kantor Cabang sebanyak 385 kantor, dan Kantor Pelayanan Kas sebanyak 343 Kantor. Kinerja penyaluran kredit BPR di Jawa Barat pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 10,3% lebih baik dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 7,9%. Pertumbuhan penyaluran kredit BPR di provinsi Jawa Barat ini, memberikan kontribusi sebesar 12,7% terhadap total penyaluran kredit BPR secara nasional tahun 2019.

BPR di provinsi Bali yang juga memiliki kontribusi cukup besar dalam penyaluran kredit pada tahun 2019. Jumlah BPR di provinsi Bali pada tahun 2019 sebanyak 133 BPR, dengan jumlah Kantor Cabang sebanyak 54 kantor, dan Kantor pelayanan Kas sebanyak 123 kantor. Kinerja penyaluran kredit BPR di Bali pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 8,2% cenderung stabil dibandingkan dengan pertumbuhan penyaluran kredit tahun 2018 sebesar 8,3%. Pertumbuhan kredit di provinsi Bali telah memberikan kontribusi sebesar 10,4% terhadap total penyaluran kredit BPR secara nasional tahun 2019.

Selanjutnya BPR di provinsi Jawa Timur memiliki kinerja penyaluran kredit cukup besar pada tahun 2019. BPR di provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 terdapat 291 BPR, dengan jumlah Kantor Cabang sebanyak 267 kantor, dan Kantor Pelayanan Kas sebanyak 866 Kantor. Pertumbuhan penyaluran kredit BPR di provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 9,8% meningkat cukup besar dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 6,1%. Pertumbuhan kredit di provinsi Jawa Timur telah memberikan kontribusi sebesar 9,9% terhadap total penyaluran kredit BPR secara nasional pada tahun 2019.

Selanjutnya BPR di provinsi Lampung menempati urutan ke lima terbesar dalam penyaluran kredit tahun 2019. BPR di provinsi Lampung pada tahun 2019 terdapat 25 BPR, dengan jumlah Kantor Cabang sebanyak 33 kantor, dan Kantor Pelayanan Kas sebanyak 20 Kantor. Pertumbuhan penyaluran kredit BPR di provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 6, 8% sama dengan pada tahun 2018 sebesar 6,1%. Pertumbuhan kredit di provinsi Lampung telah memberikan kontribusi sebesar 8,9% terhadap total penyaluran kredit BPR secara nasional tahun 2019.

Dari penelitian tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 BPR di pulau

Jawa khususnya provinsi Jawa Tengah (24,7%), Jawa Barat (12,7%) dan Jawa Timur (9,9%) dinilai berhasil dalam meningkatkan kontribusi kinerja penyaluran kredit dibandingkan dengan BPR di provinsi lainnya. Banyaknya jumlah BPR dan kantor pelayanan baik kantor cabang dan kantor kas di ketiga provinsi tersebut dan kualitas pelayanan yang baik, mampu memberikan pelayanan yang lebih menyebar dan menyentuh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Selain itu, publikasi BPR Nasional yang kuat di setiap provinsi memiliki peran penting dalam membangun *branding* BPR di masyarakat. Sampai saat ini BPR dinilai mampu dalam membangun kepercayaan bahwa BPR merupakan mitra terbaik bagi masyarakat yang memerlukan dana dan menyimpan dana dengan aman. Ketatnya regulasi yang mengatur operasional BPR termasuk permodalan, agar BPR tumbuh sehat dan kuat, serta didukung adanya stabilitas pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menjadikan BPR memiliki daya saing yang kuat sehingga terbuka peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam penyaluran kredit dalam rangka mengembangkan perekonomian di setiap provinsi di mana BPR beroperasi. Upaya BPR secara nasional untuk lebih meningkatkan pelayanannya dengan menyesuaikan

pada teknologi digital di era disruptif ini, menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan untuk terus meningkatkan daya saing dengan lembaga keuangan lainnya dalam penyaluran kredit yang sehat dan menguntungkan.

2. Kinerja Penyaluran Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi

BPR sebagai lembaga keuangan bank dalam memberikan pelayanan pemberian kredit pada umumnya memiliki tiga jenis produk, pertama produk kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif.

Kredit Modal kerja diberikan BPR kepada calon nasabah dan para nasabah yang memerlukan dana untuk menambah modal usaha, sehingga usaha semakin berkembang dan perekonomian keluarga semakin sejahtera. Sebagai contoh, seorang calon pemohon kredit yang memiliki usaha bengkel sepeda motor, memerlukan dana untuk keperluan penambahan persediaan oli dan perlengkapan sepeda motor, seperti ban, busi dan sebagainya, sehingga ia mengajukan kredit Modal Kerja. Sektor ekonomi kredit modal kerja ini bisa meliputi usaha pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan, jasa

kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya dan lain-lain.

Kredit Investasi yang diberikan BPR pada umumnya untuk keperluan yang mendukung kelancaran usaha. Sebagai contoh, seorang calon nasabah yang memiliki usaha percetakan memerlukan dana untuk keperluan pembelian mesin cetak sehingga pemohonan mampu meningkatkan omset usaha.

Kredit Konsumtif yang diberikan BPR pada umumnya untuk keperluan yang bersifat personal atau keluarga dan tidak berhubungan dengan usaha. Sebagai contoh, seorang calon nasabah yang pekerjaannya adalah karyawan sebuah perusahaan swasta, mengajukan kredit ke BPR untuk keperluan merenovasi rumah yang ia tempati. Sektor ekonomi kredit konsumtif adalah kredit untuk kepemilikan rumah untuk dihuni, kredit kepemilikan kendaraan bermotor, dan kredit konsumsi lainnya.

Berdasarkan laporan Statistik perbankan Indonesia tahun 2019, perkembangan penyaluran kredit BPR sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, berdasarkan Jenis Penggunaan Kredit dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Kinerja Penyaluran Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2016 – 2019

Jenis Penggunaan	Penyaluran Kredit BPR per Tahun (Dalam Miliar Rupiah)							
	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Kredit Modal Kerja	35.958	7,3%	39.773	10,6%	44.279	11,3%	49.166	11,0%
Kredit Investasi	5.641	15,1%	6.467	14,6%	7.385	14,2%	8.327	12,8%
Kredit Konsumtif	40.085	10,1%	43.241	7,9%	46.556	7,7%	51.291	10,2%
Jumlah	81.684	9,2%	89.481	9,5%	98.220	9,8%	108.784	10,8%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel kinerja penyaluran kredit di atas menunjukkan kinerja pertumbuhan penyaluran kredit BPR untuk jenis penggunaan kredit Modal Kerja sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 7,3%, 10,6%, 11,3% akan tetapi pada tahun 2019 pertumbuhannya tidak jauh berbeda dengan tahun 2018 yaitu sebesar 11%. Sedangkan kinerja pertumbuhan penyaluran kredit untuk jenis penggunaan kredit investasi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun, masing-masing sebesar 15,1%, 14,6%, 14,2% dan 12,8%. Hal ini berbeda dengan kinerja pertumbuhan penyaluran kredit jenis penggunaan kredit konsumtif yang kondisinya fluktuatif, pada tahun 2016 tumbuh sebesar 10,1%, tahun 2017 sebesar 7,9%, tahun 2018 sebesar 7,7% dan pada tahun 2019 naik menjadi 10,2%. Kondisi ini menggambarkan adanya perubahan pola penggunaan kredit nasabah BPR, terdapat pengurangan pada kredit investasi dan cenderung penamba-

han pada kredit konsumtif. Penyaluran kredit BPR tahun 2019 terbanyak adalah untuk jenis penggunaan konsumtif yaitu sebesar Rp. 51.291 triliun. BPR lebih banyak menyalurkan kredit kepada nasabah pada sektor ekonomi kepemilikan rumah untuk dihuni, kredit pemilikan kendaraan bermotor, dan juga kredit konsumsi lainnya. Berdasarkan pada data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2019, sebesar 93,6% penyaluran kredit penggunaan konsumtif BPR adalah di sektor konsumsi lainnya. Pada umumnya kredit sektor konsumsi lainnya ini di antaranya untuk keperluan biaya pendidikan/sekolah, renovasi rumah dan lain-lain yang bersifat personal. Sedangkan penyaluran kredit pada sektor ekonomi kredit kepemilikan rumah untuk dihuni sebesar 4,1% dari total kredit konsumtif, dan terakhir di sektor pemilikan kendaraan bermotor sebesar 2,3%.

Dalam hal penyaluran kredit untuk jenis penggunaan modal kerja, jumlahnya menempati urutan kedua dari seluruh total penyaluran

kredit BPR pada tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 49.166 triliun. BPR menyalurkan kredit jenis modal kerja terbesar pada sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran, yaitu mencapai 42,9% dari total kredit modal kerja pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena sektor perdagangan rata-rata mayoritas menjadi aktivitas pekerjaan masyarakat, sehingga menjadi fokus target BPR dalam menyalurkan kredit. Sedangkan di sektor jasa kemasyarakatan dan perorangan lainnya yaitu mencapai 12,4% dari total kredit modal kerja, dan 10% kredit modal kerja tersebut disalurkan pada sektor ekonomi pertanian, khususnya BPR yang berada di wilayah pertanian atau perkebunan.

Sedangkan urutan ketiga penyaluran kredit BPR pada tahun 2019 adalah untuk jenis penggunaan kredit investasi yaitu sebesar Rp. 8.327 triliun. Sektor ekonomi kredit investasi yang dibiayai BPR mayoritas adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang jumlahnya mencapai 29,3% dari total kredit investasi. Hal ini disebabkan pada sektor perdagangan besar dan eceran banyak aktivitas usaha yang memerlukan sarana pendukung sehingga kredit investasi dinilai paling tepat digunakan. BPR juga banyak menyalurkan kredit investasi pada sektor ekonomi Jasa kemasyarakatan, jumlahnya

sebesar 18,2% dari total kredit investasi. Sektor ekonomi ini terus bertambah dari tahun ke tahun di mana selain perdagangan masyarakat juga memiliki usaha di bidang jasa sehingga untuk mendukung usahanya memerlukan kredit investasi. Sektor ekonomi lainnya yang dibiayai kredit investasi tersebar pada sektor pertanian, perikanan, *real estate*, usaha persewaan, transportasi, jasa pendidikan, jasa perorangan yang melayani rumah tangga dan lainnya yang relatif kecil.

Berdasarkan pada penelitian di atas, kinerja BPR dalam penyaluran kredit sesuai jenis penggunaannya selama empat tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan penyaluran kredit, meskipun secara pertumbuhan kredit konsumtif lebih besar dibandingkan kredit modal kerja dan mengalami penurunan pada kredit investasi. Peningkatan penyaluran kredit modal kerja pada tahun 2019 ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor perekonomian masyarakat yang paling dominan yaitu perdagangan, pertanian dan jasa di setiap provinsi di mana BPR beroperasi. Sedangkan penyaluran kredit investasi juga banyak membantu masyarakat disektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Kinerja BPR dalam penyaluran kredit konsumtif banyak membantu masyarakat yang

memerlukan dana untuk sektor konsumsi lainnya yang bersifat mendesak dan sangat dibutuhkan dengan proses yang mudah dan cepat.

3. Kinerja Risiko Penyaluran Kredit BPR

Kredit merupakan aktiva produktif BPR yang jumlahnya paling besar dari seluruh total aset BPR dan memiliki risiko menimbulkan kerugian jika tidak dikelola dengan manajemen yang sehat, baik dalam proses kredit saat awal pengajuan kredit, kemudian saat kredit sedang berjalan dengan melalui pembinaan dan pengawasan kredit, serta saat kredit mengalami masalah. Risiko dalam penyaluran kredit ini harus diantisipasi sebab akan mengancam kelanjutan usaha BPR di kemudian hari.

Kinerja risiko penyaluran kredit BPR yang sehat sesuai ketentuan dapat diukur

dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan* (NPL). Batasan rasio NPL yang sehat maksimal 5%, jika lebih besar dari 5% maka dinilai kinerja manajemen kredit BPR tidak sehat sebab risiko kreditnya besar.

Berkaitan dengan pertumbuhan penyaluran kredit BPR pada tahun 2019, maka BPR harus memperhatikan tingkat risiko kredit yang timbul dengan mengukur rasio NPL, sehingga BPR dapat melakukan tindakan antisipasi yang efektif dan efisien agar kredit yang disalurkan menguntungkan.

Berdasarkan pada data Statistik Perbankan Indonesia tahun 2019, dapat disajikan perkembangan kinerja risiko kredit BPR secara Nasional dengan menggunakan rasio NPL untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 sebagai berikut:

Tabel 4. Kinerja Risiko Kredit BPR Tahun 2016 – 2019

Parameter Risiko Kredit	Kinerja NPL per tahun			
	2016	2017	2018	2019
<i>Non Performing Loan</i>	5,83%	6,15%	6,37%	6,81%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2019

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa risiko Kredit Bermasalah yang dihadapi BPR semakin besar jumlahnya, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rasio NPL pada tahun 2019 yang mencapai 6,81% lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016 sampai dengan 2018 masing-masing 5,83%,

6,15% dan 6,37%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa perbandingan antara jumlah kredit yang lancar dengan bermasalah yang melampaui 5% selama empat tahun terakhir, mengindikasikan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit BPR dari tahun ke tahun, semakin besar risiko yang mengancam dan berpotensi dapat

merugikan BPR. Dengan kondisi ini manajemen BPR secara Nasional harus memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses seleksi pemberian kredit baik untuk penggunaan modal kerja, investasi maupun konsumtif. Manajemen BPR juga harus memperhatikan adanya pembatasan kredit pada sektor ekonomi yang berisiko tinggi dan rentan terancam kondisi ekonomi saat ini yang tidak pasti. Kredit modal kerja dan investasi yang disalurkan terutama harus memperhatikan pada sektor ekonomi perdagangan yang produktif dan menguntungkan saja, dengan memperhatikan prinsip lima C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*), sebagai bentuk kehati-hatian agar kredit yang diberikan bermanfaat dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan *asset* dan *profit* BPR.

Kredit konsumtif yang terkonsentrasi pada sektor kredit konsumsi lainnya tetap harus menjadi perhatian manajemen sebab kredit di sektor ini tidak ada bentuk fisik yang dihasilkan seperti halnya kredit untuk kepemilikan rumah atau pembelian kendaraan. Kredit konsumsi lainnya lebih mengedepankan pada manfaat yang bisa menambah nilai personal debitur atau keluarganya, seperti kredit untuk pendidikan, renovasi rumah, perbaikan kenda-

raan, biaya pengobatan dan lainnya yang bersifat *emergency* ataupun telah terencana. Dengan demikian risiko kredit konsumtif harus diwaspadai sebab rentan terjadi masalah, terutama jika pekerjaan debitur adalah karyawan perusahaan yang tidak dikenal secara luas, atau debitur telah mendapat fasilitas kredit dari lembaga keuangan lainnya dan memiliki catatan masalah.

Dengan memperhatikan kinerja risiko penyaluran kredit BPR secara Nasional pada saat ini menjadi prioritas utama perbaikan dalam tata kelola pemberian kredit yang sehat dengan memperhatikan pada regulasi yang berlaku dan penerapan kebijakan pemberian kredit yang sehat, sehingga pertumbuhan penyaluran kredit yang sudah baik didukung dengan pertumbuhan kualitas kredit yang sehat.

Kebaruan penelitian ini dari yang sudah ada adalah dalam penelitian ini penulis lebih spesifik dalam melakukan analisis terhadap kinerja penyaluran kredit dan risiko kredit yang dihadapi BPR secara Nasional selama empat tahun terakhir. Penelitian berdasarkan pada data sekunder yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia Tahun 2019 yang diambil dari *website* Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian ini menjelaskan secara

terinci setiap perkembangan kinerja penyaluran kredit dari tahun 2016 sampai dengan 2019, baik pertumbuhan penyaluran kredit secara keseluruhan per tahun, maupun per jenis penggunaan kredit yang disalurkan, sektor ekonomi kredit yang dibiayai.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian tersebut di atas dengan cara melakukan analisis terhadap kinerja Penyaluran Kredit BPR pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja penyaluran kredit BPR secara Nasional pada tahun 2016 sampai dengan 2019 setiap tahunnya mengalami pertumbuhan antara 9,2% sampai dengan 10,8%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepercayaan untuk bermitra dengan BPR.
2. Terdapat lima provinsi yang memiliki kinerja pertumbuhan penyaluran kredit BPR terbesar pada tahun 2016 sampai dengan 2019, yaitu provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jawa Timur dan Bali. Pertumbuhan penyaluran kredit BPR di provinsi tersebut secara keseluruhan antara 7,2% sampai dengan 10,6% setiap tahunnya.
3. Kinerja penyaluran kredit BPR secara

Nasional selama empat tahun terakhir untuk jenis penggunaan Modal Kerja, Investasi dan Konsumtif. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 penyaluran kredit terbesar adalah untuk penggunaan konsumtif, selanjutnya untuk kredit modal kerja dan investasi.

4. Kinerja penyaluran kredit BPR secara Nasional baik untuk modal kerja maupun kredit investasi mayoritas pada sektor ekonomi perdagangan, sedangkan untuk kredit konsumtif mayoritas untuk sektor konsumsi lainnya, disamping untuk kepemilikan rumah dan kepemilikan kendaraan bermotor.
5. Risiko penyaluran kredit BPR selama empat tahun terakhir semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja rasio *Non performing Loan* (NPL) yang terus melampaui batasan sehat yaitu maksimal 5%.

DAFTAR PUSTAKA

- Alinda, P., & Kusuma, H. 2018. Popy Dwi Alinda 1 ,Hendra Kusuma 2. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 419–427.
- Junus, O., & Lagata, N. 2017. Analisis Perbandingan Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berdasarkan Metode CAMEL di Kabupaten Gorontalo. *Akuntabilitas*, 10(1), 131–152.

- Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan* (13th ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Novianto, D., Suharti, T., & Yudhawati, D. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Kredit Terhadap Non Performing Loan Studi Kasus Pada Pd.Bpr Lpk Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 4(2), 1689–1699.
- Nurjannah, & Nurhayati. 2017. Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 590–601.
- Romli, H., & Alie, M. 2017. Diterminan Penyaluran Kredit dan Implikasinya Terhadap Kinerja Profitabilitas Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 15(1).
- Supeno, W. 2015. Return on Asset Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Widya Cipta*, VII(1), 8–19.
- Supeno, W. 2017. Analisis Kinerja Penghimpunan Dana dalam Meningkatkan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Moneter*, IV(2), 121–131.
- Supeno, W. 2018. Implementasi Kualitas Pelayanan di Era Disrupsi Pada PD BPR Bank Jombang Jawa Timur. *Jurnal Perspektif* 2(2), 255–262.
- Supeno, W., & Islami, V. 2019. Evaluasi Penerapan Tata Kelola Bank Pada PT BPR Eka Bumi Artha. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 157–166.